

BAB II
PROBLEMATIKA SEKS BEBAS DI INDONESIA DAN PERHATIAN
PLAN INTERNATIONAL INDONESIA

Dinamika persoalan perilaku remaja di Indonesia seakan-akan dianggap bukan hal yang penting untuk diperhatikan. Padahal pentingnya bagi komunitas yang ada di sekitar remaja untuk lebih memerhatikan dan memberikan perlindungan terhadap remaja-remaja di Indonesia. Hal ini penting sebagai bentuk pengawasan sejak dini agar remaja tidak melakukan perilaku beresiko. Faktanya, di remaja di Indonesia masih banyak yang terjerumus dari perilaku beresiko, salah satunya seks pranikah hingga menjerumus pada KTD hingga keputusan aborsi yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

Pada BAB ini, penulis mengelaborasi bagaimana kondisi remaja di Indonesia khususnya pada kelompok usia 15-19 tahun serta menjelaskan bagaimana sikap masyarakat di Indonesia terhadap seks pranikah pada remaja dan aborsi di Indonesia dengan melihat dari sudut pandang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Penjabaran data pada BAB ini menjadi acuan berjalannya penelitian ini, kemudian diiringi bagaimana tanggapan *PLAN International Indonesia* terhadap kondisi remaja sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh PII hingga diperlukannya sosok *global civil society* untuk membantu mengupayakan persoalan dinamika pergaulan remaja di Indonesia.

2.1 Tingginya Kasus Perilaku Seks Bebas dan Aborsi di Indonesia

Pergeseran pandangan terkait seks pranikah pada remaja di Indonesia berakibat pada peningkatan perilaku seks pranikah pada remaja. Pergeseran pandangan masyarakat Indonesia yang menganggap hubungan seks pranikah adalah hal yang lumrah, berkaca pada budaya barat. Perilaku seks pranikah pada remaja ini juga dilatarbelakangi pada beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama adalah kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab pada pengawasan remaja, yaitu orang tua yang terutama memberikan pengawasan serta didikan sejak kecil bagi anaknya, hanya saja liberalisasi pada pandangan seks pranikah ini berdampak pada perilaku remaja saat ini yang memiliki kontrol lebih atas hidupnya berbanding lurus dengan kebebasan untuk mengeksplor seksualitasnya sekaligus mengikutsertakan pasangannya.¹

Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja juga salah satu faktor yang berdampak pada perilaku seks pranikah. Rendahnya pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi ini berkontribusi pada pengetahuan yang dimiliki oleh para remaja yang berbanding lurus pada penerimaan informasi terkait hal-hal seksual hanya berdasarkan film, video, majalah, ataupun berbagai media massa lainnya, lalu perbincangan secara kasual bersama teman, yang secara jelas diragukan kredibilitasnya, terutama hal-hal seperti ini condong tidak menunjukkan konsekuensi atau dampak dari perilaku seks pranikah, sehingga remaja-remaja ini

¹ James O'Donell, *Op. Cit.*, hal. 2

berbekal pengetahuan berdasarkan asumsi, bukan pengetahuan secara literatur terkait kesehatan seksual dan reproduksinya.²

Didorong rasa penasaran serta kebutuhan biologis, sekelompok remaja di Indonesia berani melakukan hubungan seks pranikah. Berdasarkan data yang penulis temukan, bahwa di Indonesia secara umum memutuskan untuk pertama kali berpacaran sejak usia 15-17 tahun, dengan persentase 45% untuk kelompok wanita dan 44% untuk laki-laki.³ Bentuk perilaku berpacaran yang terjadi pada remaja di Indonesia memiliki pola arah hubungan yang beragam, kategori pertama adalah pola hubungan yang sehat sehingga tidak membawa pengaruh dan dampak yang buruk, seperti sekadar hanya berkumpul dan tidak mengarah kepada perilaku menyimpang. Selanjutnya kategori pola hubungan yang kedua adalah hubungan yang mengarah kepada pola perilaku berpacaran yang cenderung negatif, yang akan mengarah kepada kebiasaan yang negatif, menyimpang hingga sampai pada titik berani untuk melakukan aktivitas seksual secara bertahap, hingga pada titik melakukan hubungan seks pranikah.⁴

Terjadinya keputusan yang dipilih oleh sepasang remaja untuk melakukan aktivitas seksual hingga mengarah pada tahap hubungan seks pranikah dikategorikan menjadi dua, yaitu keputusan secara sadar dari dua pihak yang terlibat dan juga terjadi karena adanya bentuk paksaan. Berdasarkan data yang

² Zahroh Shaluhiyah, *Socio-Cultural and Socio-sexual Factor Influence The Premarital Sexual Behaviour of Javanese Youth in The Era of HIV/AIDS*, Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, Vol. 2, No. 2, Agustus 2007, hal. 62

³ BKKBN, *Op. Cit.*, hal. 120

⁴ Iknandi Tiara Lukitasari, *Perilaku Pacaran ditinjau dari Interaksi Pola Asuh Orang Tua dan Asal Sekolah*, Publikasi Ilmiah, Surakarta: Program Studi Psikologi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 2-3.

dikeluarkan oleh BKKBN melalui SDKI ditemukan 4 alasan untuk melakukan hubungan seks pranikah, yaitu 54% perempuan dan 46% laki-laki beralasan karena saling mencintai, 34% karena rasa ingin tahu atau penasaran, alasan selanjutnya adalah karena ‘terjadi begitu saja’, dan alasan yang terakhir sebanyak 16% perempuan mengakui bahwa melakukan hubungan seks pranikah karena adanya paksaan, sedangkan sebanyak 0,7% laki-laki mengakui melakukan seks pranikah karena adanya bentuk paksaan.⁵

Terutama bagi pasangan remaja yang melakukan hubungan seks pranikah dengan persetujuan bersama seharusnya benar-benar paham atas perilaku mereka akan menghadirkan konsekuensi pada masing-masing pihak, sedangkan bagi 16% perempuan dan 0,7% laki-laki yang mengaku melakukan hubungan seks pranikah akibat dipaksa, penting bagi lingkungan sekitar, setidaknya bagi orangtua untuk memberikan perlindungan dan pendampingan secara fisik dan mental jika adanya kemungkinan resiko yang ada akibat hal tersebut, seperti KTD bagi perempuan, hingga IMS. Oleh karena itu, perilaku remaja yang terlalu bebas dalam berpacaran dapat memungkinkan terjadinya hubungan seks pranikah. Dari sumber yang sama, ditemukan kategori usia rata-rata pertama kali bagi laki-laki dan perempuan telah melakukan hubungan seks pranikah.⁶

Tabel 2.1 Usia Pertama Kali Berhubungan Seksual

Usia	Laki-Laki	Perempuan
------	-----------	-----------

⁵ BKKBN, BPS, Kemenkes, *Op.Cit.*, hal. 124

⁶ BKKBN, BPS, Kemenkes, *Op.Cit.*, hal. 126

11-14	6%	6%
15-19	74%	59%
20-24	12%	22%

Sumber: BKKBN, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017, 2018

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata rentang usia pertama kali inisiasi dalam melakukan hubungan seks pranikah unggul pada kategori usia 15-19 tahun. Anak dibawah umur dengan kisaran usia 11-14 tahun, untuk beberapa remaja telah menjadi usia pertama kali melakukan hubungan seks pranikah. Selanjutnya pada kategori usia 15-19 tahun dengan persentase sebesar 74% laki-laki dan 59% perempuan mengakui menjadi usia awal ia untuk melakukan hubungan seks pranikah dan diikuti oleh kategori usia 20-24 yang menjadi usia pertama kali dalam hubungan seks pranikah. Berdasarkan sumber data yang berbeda, kategori usia 15-19 tahun menduduki peringkat pertama dengan persentase sebesar 64,8% sedangkan untuk kategori usia 20-24 dengan total sebesar 35,2% terhitung hingga pada tahun 2019.⁷

Tahapan-tahapan kategori usia diatas dapat diketahui bahwa kisaran usia tersebut sedang berada dalam pendidikan SMP bagi usia 11-14 tahun, SMA bagi usia 15-19 tahun dan perkuliahan hingga *fresh graduate* bagi usia 20-24 tahun. Data ini membuktikan bahwa remaja di Indonesia telah berani untuk melakukan hubungan seks pranikah yang masih memiliki status sebagai pelajar atau mahasiswa. Terutama pada kategori usia *minor* masih terlalu awal, beresiko tinggi

⁷ Oktriyanto, Alfiasari, *Dating and Premarital Sexual Inisiation on Adolescence in Indonesia*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 15, No. 1 (2019), hal. 100-101

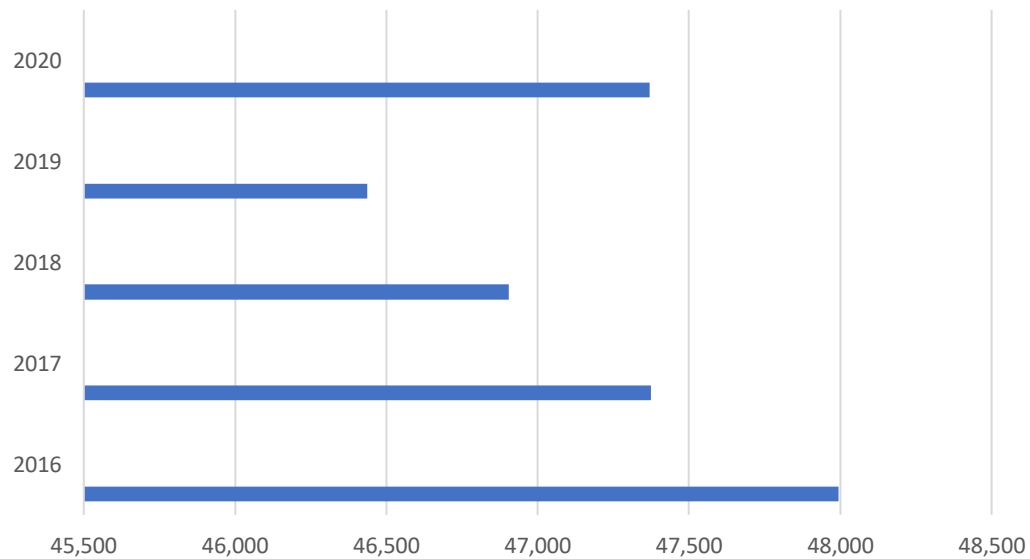
untuk memiliki pengalaman seksual, padahal seharusnya untuk rentang usia seperti itu penting sekali bagi orangtua, lingkungan sekitar serta sekolah untuk mendampingi anak-anak dan remaja agar tidak melakukan hubungan seks pranikah tanpa berpikir panjang terkait konsekuensi yang ada nantinya di masa yang akan datang akibat perilakunya.

Perempuan menjadi sosok yang paling beresiko merasakan segala kemungkinan dari perilaku hubungan seks pranikah, resiko terbesar yang terjadi akibat hubungan seks pranikah adalah KTD. Berdasarkan data yang didapat, sebanyak 41,8% perempuan berusia 15-24 tahun di Indonesia dengan total jumlah 1.124 responden perempuan dan laki-laki telah mengalami KTD atau berhadapan pada situasi pasangannya yang mengalami KTD (bagi responden laki-laki) melalui SDKI yang dilaksanakan BKKBN pada tahun 2017.⁸ KTD paling beresiko dialami oleh remaja perempuan 15-19 tahun jika dibandingkan dengan perempuan yang sudah tergolong dewasa muda, usia 20-24 tahun. Bagi remaja usia 15-19 tahun memiliki persentase sebesar 16% mengalami KTD.⁹ Angka kehamilan pada remaja usia 15-19 tahun di Indonesia cukup terbilang tinggi karena tiap tahunnya sejak tahun 2016-2020 angka kehamilan pada remaja usia 15-19 mencapai 40 ribuan.

Grafik 2.1 Kehamilan Pada Remaja Usia 15-19 Tahun di Indonesia
(Jumlah Kelahiran per 1000 Perempuan)

⁸ Ibid, hal. 139

⁹ Ibid, hal. 127



The World Bank & Statista

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2016 ditemukan bahwa sebanyak 47.994 kehamilan pada remaja dengan rentang usia 15-19 tahun di Indonesia. Kemudian pada tahun 2017 hingga tahun 2019 di Indonesia secara konsisten mulai mengalami penurunan angka kehamilan pada remaja dengan rentang angka dari 47.374 di tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 dengan selisih sebesar 469, yaitu sebanyak 46.905 kasus kehamilan dan mengalami penurunan kembali di tahun 2019 dengan angka 46.436.¹⁰ Kemudian pada tahun 2020, sangat disayangkan angka kehamilan pada remaja mengalami peningkatan sebanyak 934 kasus dengan angka mencapai 47.370.¹¹

¹⁰ The World Bank, *Adolescent Fertility Rate (Births per 1000 women ages 15-19)*, United Nations Population Division, diakses dalam <https://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT?type=shaded&view=map&year=2011> (7/7/2021, 19:29 WIB)

¹¹ Statista Research Department, *Adolescent Fertility Rate APAC 2020 by Country or region*, diakses dalam <https://www.statista.com/statistics/631112/asia-pacific-adolescent-fertility-rate-in-asia-pacific/> (7/7/2021, 19:34 WIB)

Tingginya kasus kehamilan di Indonesia berdasarkan data diatas berbanding lurus dengan minimnya ilmu terkait kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja perempuan di usia 15-19 tahun, didampingi dengan rasa penasaran, dorongan biologis tanpa bekal ilmu, serta pemikiran yang masih belum kritis terkait sebab-akibat dari melakukan hubungan seks pranikah dengan pasangannya, KTD pun dialami oleh mereka. Sejalan dengan KTD yang dialami oleh remaja perempuan, hadirnya berbagai akibat yang dirasakan oleh perempuan, secara sosial perempuan yang mengalami KTD akibat dari hubungan seks pranikah akan mengalami tekanan dari masyarakat, seperti dianggap sebagai aib keluarga, pemberhentian sekolah secara paksa, kemungkinan ditinggalkan oleh pasangannya dan harus menanggung sendiri akibatnya. Tidak sampai situ, bayi yang lahir dari kehamilan ini akan dipandang sebelah oleh masyarakat, dan seringkali dihakimi sebagai ‘anak haram’, terutama kondisi di Indonesia yang dimana sebagian masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai budaya tradisional serta agama, jadi peristiwa seperti KTD akan sulit untuk diterima oleh masyarakat.¹²

Diskriminasi sosial seperti ini akan terasa berat sebelah bagi perempuan, karena jika telah terjadi persoalan seperti ini, laki-laki tidak begitu dihakimi oleh masyarakat, standar ganda seperti inilah yang hanya merugikan perempuan, padahal perbuatan dilakukan oleh pasangan. Berbanding lurus dengan resiko KTD yang terjadi akibat hubungan seks pranikah, remaja perempuan akan dihadapi pada dua pilihan, mempertahankan kehamilannya hingga masa kelahiran bayi, atau memutuskan untuk melakukan praktik aborsi untuk menutupi perbuatannya. Bagi

¹² Linda Rae Benett, Op.Cit., hal. 37

usia remaja usia 15-19 tahun, kerap dihadapi atas ketidaksiapan dengan kondisi KTD, oleh karena itu melakukan aborsi menjadi salah satu jalan pilihan dari kebanyakan perempuan yang mengalami KTD.¹³

Berdasarkan data yang ditemukan bahwa angka praktik aborsi banyak dilakukan oleh usia 15-19 tahun dengan persentase sebesar 30% yang menandakan berbanding lurus dengan kasus KTD bagi pelaku seks pranikah, ditemukan bahwa di Indonesia setiap tahunnya terdapat total 2,5 juta kasus aborsi hingga pada tahun 2019.¹⁴ Semakin banyak terjadinya kasus KTD akibat perilaku seks pranikah oleh remaja, akan semakin banyak juga kemungkinan adanya aborsi dilakukan oleh remaja perempuan. Oleh karena itu, menurut Kementerian Kesehatan Indonesia adanya praktik aborsi baik secara ilegal maupun legal menyumbang 30 hingga 50 persen angka kematian ibu yang mengalami kehamilan.¹⁵

Hingga saat ini, seks pranikah, KTD dan praktik aborsi masih menjadi sisi gelap dalam persoalan kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan. Kurangnya pendampingan terkait pengetahuan kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia menjadikan kurangnya pemahaman remaja di Indonesia yang melakukan hubungan seks pranikah, sehingga menghadirkan dampak-dampak negatif yang hanya memberikan kerugian secara fisik, hingga mental.

¹³ Mufliha Wijayanti, *Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, No. 1, Juni 2015

¹⁴ Bella Claudia Maria, dkk, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penjual Obat Aborsi secara Online yang Tidak Memiliki Izin di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 1, No.II, September 2019. ISSN 2656-6141

¹⁵ Intan Fitri Meutia, dkk, *Aborsi; Hak Anak untuk Hidup atau Mati (Pendekatan Sosiologis Kebijakan Aborsi di Indonesia, Jepang dan China)*, hal. 1

2.2 Sikap Masyarakat terhadap Perilaku Seks Bebas dan Aborsi

Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan dalam berekspresi dan bersuara di ruang publik, sehingga diperbolehkannya untuk mempromosikan nilai-nilai kebudayaan baik melalui tradisi maupun agama secara bebas. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak hanya nilai kebudayaan lokal saja yang dipromosikan, tetapi akibat adanya globalisasi nilai kebudayaan Barat juga mulai dipromosikan melalui informasi yang bisa diakses oleh masyarakat seperti melalui media hingga internet.¹⁶ Tereksposnya budaya barat di Indonesia ini berdampak pada perkembangan beberapa aspek di Indonesia, termasuk pola berpikir masyarakat Indonesia yang semakin banyak menjunjung nilai-nilai liberal sehingga berujung pada perdebatan antara kelompok konservatif yang cenderung mempertahankan nilai moral Indonesia dan kelompok liberal yang banyak mengadopsi nilai-nilai Barat. Hal ini termasuk kepada persepsi masyarakat Indonesia dalam menanggapi perilaku seks bebas dan aborsi di Indonesia, yang terbagi menjadi dua.¹⁷

Karakteristik sosial di Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral budaya dan agama, dua nilai ini yang cenderung memberikan arah dan membentuk pola perilaku serta pemikiran masyarakat Indonesia.¹⁸ Nilai budaya terbentuk atas

¹⁶ Iwu Dwisetyani Utomo, 1997, *Sexual Attitudes and Behaviour of Middle-Class Young People in Jakarta*, Tesis, Canberra: Demography and Sociology Research School of Social Sciences, The Australian National University, hal. 229

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Susana Sabarni, Lidia Laksana Hidajat, *Peran Nilai Pribadi, Nilai Budaya dan Nilai Budaya dan Nilai Religius terhadap Sikap Remaja Perempuan tentang Seks Pranikah (Suatu Kajian pada Remaja Perempuan di Maumere dan Larantuka, NTT)*, Jurnal Kesehatan Reproduksi, Vol. 5. No. 2, Agustus 2018, hal. 107

norma dan kepercayaan yang diinternalisaikan oleh khalayak umum yang berasalkan dari adat istiadat masyarakat tersebut, sehingga dengan masyarakat menerapkan nilai budaya pada kehidupannya dapat menjadi pedoman yang mengarahkan pada orientasi kehidupan.¹⁹ Sedangkan nilai keagamaan terbentuk atas kepercayaan yang dianut oleh setiap individu berdasarkan sumber keagamaan masing-masing, dimana di Indonesia sendiri mayoritas agama yang dianut adalah Islam, sehingga nilai keagamaan yang tersebar di masyarakat Indonesia mayoritas berdasarkan ajaran Islam.²⁰

Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan dengan menjaga keperawanan khususnya bagi perempuan yang belum menikah, hal ini merupakan pandangan dari sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap jika persoalan keperawanan menjadi acuan dalam mengukur martabat dan harga diri dari seorang perempuan.²¹ Sehingga masyarakat Indonesia akan menilai dan memandang sebelah mata bagi perempuan yang belum menikah telah diketahui melakukan hubungan seks pranikah, konsep “keperawanan” seharusnya tidak menjadi sebuah standar dan tidak sesederhana itu hingga dapat disimpulkan untuk menilai perempuan. Konstruksi sosial yang dibangun di kalangan masyarakat Indonesia sejak dulu dalam memandang perempuan adalah sebagai individu feminim yang ideal dengan karakteristik cantik, anggun, dan penurut.²² Tumbuhnya

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Patmawati, *Virginty Value ditinjau dari Big Five Personality*, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 1, No. 2, Agustus 2013.

²² Inez Kristanti, Elizabeth Kristi Poerwandari, *Premarital Sexual Compilance among Urban Indonesian Women: A Descriptive Study*, Pyschological Research on Urban Society, 2018, Vol. 1 No.1, hal. 27

konstruksi sosial yang sudah melekat pada masyarakat di Indonesia seakan-akan menjadi tuntutan bagi perempuan di Indonesia untuk berperilaku demikian, sehingga identitas yang dibangun oleh perempuan demi memenuhi karakteristik dan dapat diterima oleh masyarakat adalah dengan mengikuti standar yang berlaku.

Latar belakang masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang tersebar di Indonesia menjadi arah berpikir masyarakat Indonesia, salah satunya dalam membahas mengenai persepsi terkait hal-hal seksual. Membahas persoalan seksual dianggap sebagai suatu hal yang tabu, dan beranggapan jika topik tersebut merupakan urusan pribadi dan tidak seharusnya menjadi perhatian bagi publik, selain itu di Indonesia sendiri masih banyak orangtua merasa malu atau tidak nyaman untuk membahas persoalan kesehatan seksual dan reproduksi kepada anak-anaknya.²³ Berdasarkan nilai yang dipercayai dan dibangun oleh masyarakat Indonesia mengatakan bahwa topik-topik yang berkaitan dengan seksualitas adalah suatu hal yang tabu, terutama persoalan seks pranikah merupakan bentuk dari penyimpangan sosial, tidak bermoral, ilegal dan berbahaya.²⁴ Nilai-nilai keagamaan pada masyarakat Indonesia juga masih sangat kuat menjadi pedoman hidup, salah satunya adalah agama Islam yang menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Ajaran Islam sangat menentang sekali perilaku seks pranikah karena hal tersebut merupakan bentuk perbuatan zina yang dasar hukumnya adalah haram sesuai apa yang telah disyariatkan.²⁵ Berhubungan dengan kedua nilai yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia cenderung berdiri pada pola

²³ Iwu Dwisetyani Utomo, *Op.Cit.*, hal. 230-231

²⁴ Inez Kristanti, Elizabeth Kristi Poerwandari, *Op. Cit.*, hal. 28

²⁵ *Ibid.*

pikir yang sangat menentang perilaku seks pranikah dan tertutup pada percakapan yang mengangkat persoalan kesehatan seksual dan reproduksi.

Penerapan nilai-nilai budaya dan agama oleh masyarakat beriringan dengan budaya patriarki yang masih sangat erat bagi masyarakat Indonesia, sehingga konstruksi sosial yang berlaku di Indonesia seakan-akan “berat sebelah”, dimana laki-laki mendominasi pada kebudayaan masyarakat yang berakibat pada kesenjangan gender yang menghadirkan adanya stigmatisasi bagi perempuan.²⁶ Sehingga jika terjadinya peristiwa seperti KTD atau diketahui telah melakukan hubungan seks pranikah, perempuan cenderung menanggung akibatnya dengan menerima perilaku dari orang lain yang merendahkan perempuan dengan menilainya sebagai perempuan rusak, murahan dan tidak terhormat sehingga bagi keluarga yang mengalami peristiwa tersebut anaknya akan dianggap sebagai aib keluarga.²⁷

Solusi paling banyak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menutupi perbuatan tersebut adalah dengan menikahkan kedua pasangan walaupun masih berada dibawah umur.²⁸ Pernikahan secara dini tidak bisa menjadi solusi alternatif untuk permasalahan ini, karena hal ini hanya akan menjadi penghalang terbesar bagi perempuan untuk dapat melanjutkan pendidikan dan mendapatkan kesempatan memiliki pekerjaan di masa depan dan berdampak pada ketidaksetaraan pada gender.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ James O'Donnell, *Op.Cit.*, hal. 19

Persepsi demikian tidak dapat diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat liberal yang cenderung terbuka pada persoalan kesehatan seksual dan reproduksi. Budaya barat yang diadopsi menyebabkan disintegrasi nilai-nilai yang ada sebelumnya, sehingga banyak pendapat yang sebelumnya ditentang oleh kelompok konservatif karena dianggap melanggar moral yang berlaku di Indonesia tetapi dapat diterima oleh kelompok liberal, salah satunya adalah lebih terbuka untuk menerima keberadaan informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia.²⁹ Pendapat kelompok liberal yang sulit diterima bagi kelompok konservatif adalah prinsip *safe sex* yang dianggap menormalisasikan perilaku seks pranikah. Bagi kelompok liberal, pemberian edukasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi dan memperkenalkan *safe sex* tidak hanya sebatas pada persoalan menormalisasikan perilaku seks pranikah pada remaja tetapi memberikan pengenalan tentang anatomi tubuh sendiri, kesehatan reproduksi, pengenalan jenis penyakit kelamin dan bentuk perlindungan dari oknum pelecehan.³⁰

Terdapat garis tipis perbedaan bagaimana proses adopsi budaya Barat pada persoalan seksual, yang pertama adalah jika bentuk paparan informasi yang berkaitan pada hal seksual melalui media hiburan dan internet, cenderung hanya mendorong stimulus untuk aktif secara seksual.³¹ Kasus seperti ini yang sering ditemukan oleh remaja di Indonesia dan berasumsi bahwa seks pranikah adalah hal

²⁹ Iwu Dwisetyani Utomo, Peter McDonald, *Adolescent Reproductive Health in Indonesia: Contested Values and Policy Inaction*, Studies in Family Planning, Vol. 40, No. 2, (Juni, 2009). Hal. 133

³⁰ Daviq Chairilisyah, *Sex Education in the Context of Indonesian Early Childhood*, International Journal of Educational Best Practices (IJEBCP), Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hal. 42-43

³¹ Iwu Dwisetyani Utomo, Peter McDonald, *Op.Cit.*, hal. 137

yang wajar dan memiliki dorongan untuk menirunya, hingga kemungkinan terburuknya memengaruhi publik berdasarkan asumsinya bahwa seks pranikah adalah hal yang dapat diwajarkan jika menerapkan *safe sex*. Sedangkan, di sisi lain hal yang sebenarnya ingin disampaikan oleh kelompok liberal terkait topik seksual adalah persoalan kesehatan seksual dan reproduksi berdasarkan sumber literatur kredibel yang salah satunya berisikan pengenalan *safe sex* yang ditujukan tidak untuk memperbolehkan melakukan hubungan seks pranikah, khususnya pada sekelompok remaja dan tujuannya sebagai bentuk informasi kesehatan seperti yang disampaikan UNFPA pada *frameworks and policies on Sexual and Reproductive Health* menyampaikan kebijakan terkait kesehatan seksual dan reproduksi yang berdasarkan pernyataan WHO, yaitu:³²

“every country in the world is now party to at least one human rights treaty that addreses health-related rights. This includes the right to health as well as other rights that relate to conditions necessary for health”

Berdasarkan pernyataan tersebut, kata *health* termasuk kepada kesehatan seksual dan reproduksi yang menjadi salah satu perwujudan HAM yang wajib diwujudkan bagi setiap negara. Yang dimaksud sebagai kesehatan seksual dan reproduksi adalah hal-hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi yang meliputi fungsi dan prosesnya, yang menjelaskan secara implisit kemampuan dalam memahami praktiknya secara aman. Selain itu, hak atas kesehatan seksual dan

³² UNFPA, 2009, *Frameworks and Policies on Sexual and Reproductive Health*, hal. 1

reproduksi yang dimaksud adalah berupa pengenalan metode, teknik, dan layanan yang berkaitan dalam menghadapi persoalan reproduksi.³³

Persoalan kesehatan seksual dan reproduksi tidak hanya sebatas dalam membahas perilaku seks saja, tetapi juga bentuk perwujudan dari reproduksi seperti salah satunya adalah praktik aborsi. Aborsi sendiri didefinisikan sebagai usaha untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin atau embrio pada rahim.³⁴ Persoalan aborsi juga menjadi perdebatan bagi masyarakat Indonesia dilihat dari sudut pandang agama, norma, dan etika.³⁵ Perdebatan terkait aborsi di Indonesia berangkat dari dua pendapat, yaitu bahwa aborsi termasuk kepada bentuk pembunuhan kepada janin yang ada, sedangkan pendapat lainnya adalah bahwa keputusan aborsi merupakan bentuk hak asasi bagi perempuan yang sedang mengalami kehamilan dalam mengambil keputusan apakah mempertahankan janinnya atau mengeluarkannya dari rahimnya dengan melakukan aborsi³⁶

Di Indonesia kebijakan terkait aborsi telah diatur oleh pemerintah, yaitu pada UU No. 36 tentang kesehatan pasal 75-77, yang mengatur indikator diperbolehkannya melakukan aborsi bagi ibu hamil. Indonesia memperbolehkan praktik aborsi kepada janin yang belum memasuki usia 6 minggu dengan syarat hanya berada dalam kondisi yang darurat, aborsi harus dilakukan melalui persetujuan yang bersangkutan, baik suami dan istri yang sedang mengandung.

³³ Ibid., hal. 3

³⁴ Bongani Tshuma, dkk, *Abortion: A Concept Analysis*, IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), Vol. 7, Issue 5, Ver VI, (Sept-Oct 2018), hal. 20

³⁵ Fanny Tanuwijaya, *Abortion on Law and Moral Perspective in Indonesia*, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 28, 2014, hal. 21

³⁶ Ibid., hal. 23

Hanya saja aturan ini dapat dikecualikan bagi korban pemerkosaan yang memutuskan melakukan aborsi, indikator selanjutnya adalah aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki izin atau lisensi resmi.³⁷

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, aborsi hanya boleh dilakukan jika dilatarbelakangi alasan kesehatan, baik ibu yang mengandung dan janinnya. Hanya saja, aturan yang telah ditetapkan ini tidak sejalan dengan kenyatannya, khususnya memberikan perlindungan terhadap perempuan. Hal ini didukung pada kasus yang belum lama terjadi, dimana perempuan usia 15 tahun di Jambi dijatuhkan hukuman 6 bulan penjara karena melakukan aborsi dari kehamilan yang diakibatkan dari pemerkosaan yang dilakukan oleh kakaknya sendiri.³⁸ Kasus ini mengundang sejumlah perdebatan khususnya bagi kelompok yang memperjuangkan hak perempuan dan anak. Sepenggal kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berlaku masih tidak dapat diimplementasikan dengan baik dan terdapat kontradiksi antara kebijakan dan aksinya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Guttmacher Institute* bersama dengan Universitas Indonesia, pada tahun 2018 diketahui di Indonesia sendiri memiliki beberapa metode yang biasanya dilakukan perempuan dalam melakukan aborsi. Sebanyak 73% mayoritas aborsi dilakukan sendiri, tidak dengan tenaga ahli. Sebanyak 40% dengan meminum jamu, 16% dengan meminum pil atau obat-obatan yang dapat memicu keguguran pada janin, kemudian 39% perempuan memutuskan

³⁷ *Ibid.*, hal. 23-24

³⁸ Aisyah Llewellyn, *Compounding Trauma: Indonesia's Abortion Law*, The Diplomat, diakses dalam <https://thediplomat.com/2018/08/compounding-trauma-indonesias-abortion-law/> (26/6/2021, 19:46 WIB)

melakukan aborsi dengan melakukan pijat tradisional.³⁹ Dari beberapa metode ini beresiko kepada pihak yang mengandung, seperti 8% dari perempuan yang mengakhiri kehamilannya dengan minum jamu diketahui mengalami komplikasi.

Dinamika perdebatan terkait aborsi di Indonesia tidak hanya sampai pada kurangnya perlindungan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan saja, pemerintah di Indonesia masih belum tegas dalam melindungi perempuan yang melakukan aborsi ilegal dengan membeli obat-obatan abal-abal tanpa resep dokter, ataupun melalui praktik yang tidak berlisensi. Sedangkan, jika berdasarkan aturan yang ditetapkan praktik aborsi hanya diperbolehkan bagi tenaga ahli yang memiliki sertifikat resmi. Kurangnya pengawasan secara ketat dari pemerintah menjadikan gerbang bagi pihak-pihak yang melakukan aborsi yang bukan dilatarbelakangi alasan kesehatan dan melakukannya secara ilegal, salah satunya adalah perempuan yang mengalami KTD yang ingin menutupi kehamilannya dengan melakukan aborsi yang biasanya dilakukan oleh remaja akibat perilaku seks pranikah, selain itu kondisi-kondisi lain seperti aborsi yang dilakukan oleh profesi PSK dengan persentase sebesar 40% dilakukan oleh perempuan yang belum menikah.⁴⁰

Merujuk pada penjelasan diatas, diperlukan sebuah solusi untuk memberikan perlindungan serta pengawasan yang jelas bagi perempuan di Indonesia sehingga dapat menghindari perdebatan atas legalitas aborsi yang

³⁹ Guttmacher Institute, *Op.Cit.*,

⁴⁰ Mufliha Wijayati, *Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro-Choice*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, No. 1, Juni 2015, hal. 57

berkelanjutan, mengurangi resiko bagi perempuan menjadi korban atas samarnya kebijakan aborsi di Indonesia seperti yang terjadi pada remaja di Jambi. Solusi ini juga menjadi cara untuk menghentikan kebebasan remaja secara diam-diam melakukan aborsi secara ilegal akibat perilakunya sendiri.

2.3 Perhatian *PLAN International Indonesia* sebagai *Global Civil Society* terhadap Kasus Aborsi di Indonesia

2.3.1 *PLAN International*

Sejarah berdirinya PLAN ini bersamaan dengan peristiwa *Spanish Civil War* pada tahun 1937 yang tujuan awal terbentuknya untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang terkena dampak dari peristiwa *Spanish Civil War*. Terbentuknya PLAN diawal merupakan inisiasi seorang jurnalis yang berasal dari Inggris bernama John Langdon Davies dan bekerja sama dengan Eric Muggeridge yang merupakan pengungsi yang menjadi korban peristiwa *Spanish Civil War*⁴¹.

Nama yang digunakan saat awal dibentuk tidak menggunakan nama “*PLAN International*”, melainkan *Foster Plan for Children in Spain*”. Alasan pengambilan nama tersebut dilatarbelakangi konsep awal terbentuknya memiliki tujuan untuk melakukan penggalangan dana yang dilakukan oleh John dan Eric yang diikuti oleh beberapa masyarakat sipil sebagai bentuk dukungan dalam pemulihan bagi anak-anak yang menjadi

⁴¹ PLAN International, *Our History*, diakses dalam <https://plan-international.org/organisation/history> (28/6/2021, 20:29 WIB)

korban *Spanish Civil War*. Hasil dari penggalangan dana yang telah dilakukan disalurkan kedalam bentuk bantuan berupa penyediaan makanan serta tempat tinggal khususnya bagi anak-anak saat itu. Alasan dilakukannya penggalangan dana oleh John dan Eric karena pada saat itu kondisi yang genting sehingga fokus yang menjadi prioritas adalah persoalan politik antara kelompok republik dan nasionalis di Spanyol, sehingga untuk persoalan humaniter saat itu bukanlah jadi prioritas utama.⁴²

Seiring berjalannya waktu, *Foster Plan for Children in Spain* berkembang hingga pada 1940an berubah menjadi *Foster Plan for War Children* yang berdiri sebagai wadah untuk menampung anak-anak yang menjadi korban pada Perang Dunia II yang terpisah dari keluarganya. Kemudian terus berkembang dan berekspansi ke negara lain hingga ke wilayah Asia pada sekitar 1960an hingga 1970an merubah namanya secara resmi menjadi *PLAN International* yang hingga saat ini telah berekspansi hingga ke 75 negara. Selain melakukan ekspansi wilayah, fokus kerja *PLAN International* juga berekspansi tidak hanya berfokus kepada anak-anak, melainkan juga memperjuangkan hak perempuan dan kesetaraan *gender* di dunia.⁴³

2.3.2 Latar Belakang Berdirinya *PLAN International Indonesia*

⁴² Wawancara penulis dengan *Staff Project Down to Zero* PLAN Indonesia, Bagus Yaugo Wicaksono, Bekasi, 2 Juni 2020

⁴³ *Op. Cit.*, <https://plan-international.org/organisation/history> (28/6/2021, 21:04 WIB)

Setelah *PLAN International* berhasil berkembang sebagai salah satu NGO yang berfokus kepada humanitarian dan melakukan ekspansi ke 75 negara, pada akhirnya *PLAN International* juga berhasil berekspansi ke Indonesia pertama kali pada tahun 1969. Latar belakang hadirnya *PLAN International* di Indonesia yang sedang dilanda krisis berat pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi, pangan, dan lain-lain. Melihat kondisi yang cukup buruk, saat itu banyak lembaga internasional yang menawarkan bantuan kepada Indonesia, salah satunya adalah *PLAN International*. Sayangnya, lembaga-lembaga tersebut banyak ditolak oleh pemerintah pusat termasuk *PLAN International*.⁴⁴

Di waktu yang bersamaan, Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu memimpin Yogyakarta memiliki relasi yang cukup baik dengan pemerintahan Inggris, sehingga permintaan *PLAN International* untuk masuk ke Indonesia yang semula ditolak oleh pemerintah pusat, Sultan Hamengkubuwono IX mengambil inisiasi jika bantuan yang ditawarkan oleh *PLAN International* dialihkan untuk di Yogyakarta saja. Persetujuan dari Sultan Hamengkubuwono IX berperan sangat besar atas berkembangnya PII di Indonesia, karena dari inisiasi tersebut, Sultan Hamengkubuwono mendukung berdirinya PII di Indonesia dengan

⁴⁴ Wawancara penulis dengan *Staff* bagian *Safeguarding Children and Young People*, Sigit Wacono, Malang, 28 Juni 2021

memberikan hibah berupa tanah serta tempat yang difungsikan sebagai kantor pertama PII yang berlokasi di Jalan Magelang wilayah Yogyakarta.⁴⁵

Sejak dihibahkan tanah dan rumah yang difungsikan sebagai kantor, PII mulai bekerja di Yogyakarta yang saat bermula dalam menangani permasalahan *stunting* dikarenakan saat itu kondisi masyarakat Yogyakarta mengalami gagal tumbuh. Oleh karena itu, program pertama dari PII adalah pengadaan pangan dan papan khususnya bagi kelompok tidak mampu di wilayah Yogyakarta. Awal terbentuknya PII di Yogyakarta.⁴⁶ PII terus menerus memberikan bantuan hingga pada tahun 1980an. Kemudian PII sudah mulai terbentuk sebagai organisasi yang kemudian berkembang diawal tahun 2000an lalu PII meninggalkan kota Yogyakarta untuk berpindah ke Jakarta hingga sekarang. Proses legalisasi *PLAN International* sebagai lembaga internasional di Indonesia, pihak PII mengajukan perizinan kepada Kementerian Luar Negeri dengan menandatangani MoU sebagai lembaga internasional yang kemudian diturunkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pengawasan kepada lembaga internasional yang bergerak di Indonesia serta diberlakukannya evaluasi setiap tahunnya oleh Kementerian Dalam Negeri.⁴⁷

Seiring berjalannya waktu, Indonesia tidak lagi mengalami krisis seiring pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden, sehingga PII tidak lagi

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Wawancara penulis dengan *Staff Project Down to Zero* PLAN Indonesia, Bagus Yaugo Wicaksono, Malang, 26 Agustus 2021

berfokus pada pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi berkembang dan menyesuaikan programnya sesuai prinsip *PLAN International* melalui kebijakan *Safeguarding Children and Young People* yang berfokus memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan kaum muda, dan perempuan, termasuk kelompok-kelompok *vulnerable* dari segala bentuk kekerasan.⁴⁸ Kebijakan ini ditetapkan dan dijadikan sebagai budaya kerja bagi siapapun yang terlibat dalam segala aktivitas dari PII termasuk pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan PII.

Sejak masuknya PII ke Indonesia, PII termasuk kepada kategori organisasi internasional, sehingga berdirinya PII di Indonesia masih berbasis hukum internasional. Status keorganisasian PII saat itu menjadi tantangan tersendiri bagi PII karena sebelumnya, PII hanya menjalankan program yang dibawah oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menandatangani MoU, yang salah satunya berisikan dalam penentuan wilayah kerja dari PII yang ditunjuk secara langsung oleh Kemendagri, PII pun tidak memiliki wewenang untuk memilih sendiri wilayah kerjanya.⁴⁹ Selain itu, PII dihadapi beberapa kendala untuk bertahan sebagai organisasi internasional di Indonesia.

Kendala yang dihadapi PII meliputi upaya PII dalam mendorong pemerintah untuk melakukan program yang dimiliki oleh PII akan dianggap

⁴⁸ *Global Policy: Safeguarding Children and Young People, Op. Cit.*, hal. 2

⁴⁹ Wawancara Penulis dengan *Staff Project Down to Zero PLAN Indonesia*, Bagus Yaugo Wicaksono, Bekasi, 15 Juni 2021

sebagai bentuk intervensi kedaulatan negara karena merasa terusik dari pihak luar negeri, selain itu PII tidak dapat melakukan penggalangan dana secara langsung, hanya bisa melalui pihak CSR dan beberapa perusahaan yang mendukung. Oleh karena itu, untuk menutup kelemahan tersebut dan lebih mudah pendekatan dengan lokal, PII memutuskan untuk mengubah bentuk organisasinya menjadi yayasan pada 15 Juni 2017.⁵⁰ Perubahan PII menjadi yayasan tidak mengubah fakta bahwa PII masih dibawah pengawasan dari *PLAN International*, sehingga PII akan selalu berhubungan dengan pihak *headquarter* dengan mengirimkan perwakilannya. Perwakilan dari Indonesia sendiri merupakan ibu Dini Widiastuti yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif dari PII.

2.3.3 *PLAN International Indonesia sebagai Global Civil Society*

Konsep *Global Civil Society* (GCS) merupakan sebuah konsep yang baru hadir dan mulai populer pada pasca perang dingin dan dianggap sebagai salah satu bentuk kapitalisme pasar dari kelompok borjuis barat.⁵¹ Jika merujuk kepada kondisi pasca perang dingin pada tahun 1990an, dimana mulai hadirnya kebebasan dan terbukanya ruang publik sosial dan politik bagi masyarakat, gerakan sosial dalam berekspresi dihadapan publik hingga kepada aktor pemerintahan baik itu nasional hingga internasional.⁵² Hal inilah yang menjadikan istilah GCS semakin populer digunakan oleh

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ John Keane, 2003, *Global Civil Society*, New York, *Cambridge University Press*, hal. 183

⁵² Helmut Anheier dkk, *Op.Cit.*, hal. 4

beberapa ilmuwan, walaupun jika secara praktiknya GCS sudah terlaksana jauh sebelum pasca perang dingin.

Berdasarkan pemaparan terkait bentuk operasional, aksi, serta program PII dalam upayanya untuk meminimalisir praktik aborsi di Indonesia, melalui BAB ini dapat menjelaskan bagaimana PII berperan sebagai GCS. Mengulas kembali definisi dari GCS, GCS dianggap sebagai konsep yang masih belum dapat dijelaskan dengan baik dan masih terdapat perdebatan, hal ini karena kebaruannya dan batas dari kata “global” yang masih ambigu.⁵³ Ambiguitas dari konsep GCS ini berujung pada kesepakatan definisi secara umum dari *global civil society* yakni sebuah ruang lingkup yang meliputi sebuah ide, nilai yang terdiri dari beberapa institusi serta organisasi jaringan dan individu yang bekerja di luar batas negara.⁵⁴ Oleh karena itu, GCS dapat dianggap sebagai wadah aspirasi untuk masyarakat dalam menjangkau kepentingannya dengan bertindak serta memiliki pola pikir sebagai masyarakat global.⁵⁵

Definisi terkait GCS ini sesuai dalam mendeskripsikan bagaimana PII itu sendiri, dimana PII merupakan salah satu organisasi Internasional yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat khususnya bagi individu atau kelompok yang memperjuangkan hak kesetaraan dan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia, kedua hal ini merupakan salah

⁵³ Jens Bartelson, *Making Sense of Global Civil Society*, European Journal of International Relations, Vol. 12, No.3, 2006, hal. 375

⁵⁴ Helmut Anheier, *Op.Cit.*, hal. 17

⁵⁵ *Ibid.*,

satu yang menjadi isu ataupun agenda internasional, dapat terlihat dan didukung dari program-program organisasi dunia lainnya yang berfokus pada isu gender dan perlindungan anak-anak seperti UNICEF, Save The Children, UN Women, dan lain-lain. PII sebagai salah satu organisasi yang bergerak pada tujuan yang sama atas prinsip dasar *PLAN International* yang memiliki prinsip serta perspektif masyarakat global dan organisasinya pun bersifat transnasional.

Melalui definisi tersebut, dapat menjelaskan upaya PII dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan, perlindungan anak dan kaum muda, serta pemenuhan akses dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. PII sebagai salah satu perwakilan atau cabang dari organisasi *PLAN International* dengan membawa kepentingan *PLAN International* ke Indonesia dengan menyesuaikan kode etik, nilai, serta relevansi terhadap kondisi di Indonesia dengan membentuk jaringan dengan organisasi-organisasi lain yang diluar Indonesia, seperti bantuan langsung dari *PLAN Netherland*, kemudian bekerjasama dengan beberapa NGO Internasional seperti *terres des hommes*, ECPAT, *Free A Girl* dan PLAN yang ada di negara lain.

Hal ini menunjukkan bahwa PII sebagai GCS sesuai dengan pendapat John Keane pada bukunya bahwa GCS memiliki sistem kelembagaan yang saling berhubungan antar negara yang memiliki efek atas

hal-hal yang diperjuangkan.⁵⁶ Jika merujuk pada pendapat John Keane, PII membangun hubungan dengan negara-negara lain dalam programnya berdasarkan kepentingan yang selama ini diperjuangkan secara umum, yaitu hak anak dan kesetaraan pada perempuan di Indonesia yang mengadopsi langsung dari program *PLAN International*. Efek yang dibawa PII berdasarkan John Keane ini menurut penulis mengarah kepada perubahan peningkatan kesadaran terhadap masyarakat terhadap isu yang diangkat, sejalan dengan hal tersebut mendorong kemungkinan perubahan cara pandang atau perilaku pada masyarakat di Indonesia.

Keberadaan PII di Indonesia untuk memenuhi hak anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk pengimplementasiannya sebagai GCS dimana segala program-programnya diprioritaskan untuk kepentingan *beneficiariesnya* semata tanpa mengambil sebuah keuntungan sekalipun. PII merepresentasikan masyarakat untuk mendapatkan hal-hal yang ingin terpenuhi oleh pemerintah, tetapi tidak terwujud. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh John Keane yang berpendapat:⁵⁷

“Global Civil Society”, runs one version of this way of thinking, is ‘a transnational domain in which people form relationships and develop elements of identity outside their role as a citizen of particular state’. It represents a sphere that thus

⁵⁶ John Keane, *Op.Cit.*, hal. 8

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 23

transcends the self-regarding character of the state system and can work in the service of a genuinely transnational, public interest'

Pendapat John Keane ini mengacu pada sistem rangkaian kerja PII sebagai GCS yang membentuk relasi secara kolektif dengan mitra-mitranya di luar posisinya dari identitas sebagai warga negara di Indonesia. Sehingga segala pihak yang terlibat dari segala rangkaian kerja PII harus membawa kepentingan umum serta tujuan mereka pun lebih luas daripada kepentingan individu maupun kepentingan nasional. Kehadiran GCS juga dapat menjadi sebagai *problem generators* menurut Raffaele Marchetti.⁵⁸ Dalam tulisannya mengatakan bahwa GCS dapat berperan sebagai *problem generators* mengacu pada kemampuan yang dapat dimiliki oleh GCS untuk dapat mengangkat sebuah isu dalam agenda internasional. Jika merujuk pada pendapat Marchetti, hal ini menunjukkan kemampuan PII untuk menjadi salah satu organisasi yang membawa isu feminisme ke Indonesia, hal ini menunjukkan terjadinya proses adaptasi sebuah isu internasional yang diangkat menjadi isu nasional.

Proses penerimaan isu internasional untuk diadaptasi oleh PII juga tidak bisa diterima begitu saja, perlu adanya pertimbangan hingga isu tersebut dapat diangkat menjadi urgensi dari program-program PII. Beruntungnya, program kesehatan seksual dan reproduksi dari PII setidaknya dapat relevan dan tidak melanggar nilai-nilai masyarakat di

⁵⁸ Raffaele Marchetti, 2016, *Global Civil Society*, E-International Relations, ISSN 2053-8626, hal. 3

Indonesia, meskipun masih banyaknya masyarakat yang menentang edukasi kesehatan seksual dan reproduksi untuk anak-anak dan kaum muda. Marchetti juga mengatakan bahwa GCS dapat berperan sebagai *problem solver*, dimana siapapun yang dapat tergolong sebagai GCS dapat menjadi aktor yang memberikan solusi apabila suatu isu sulit atau tidak dapat diterima oleh pihak pemerintah. Pernyataan ini berkesinambungan dengan pernyataan salah satu narasumber yang mengatakan bahwa kehadiran PII di Indonesia dengan melakukan advokasi kepada pemerintah dan menjadi *solution provider* bagi pemerintah apabila sekiranya pemerintah tidak mampu menjalankan kebijakan atau programnya.⁵⁹

Global Civil Society menurut Jan Aart Scholte, berdasarkan tujuannya dapat terbagi menjadi 3, yaitu konformis, reformis, dan radikal. Konformis merupakan bentuk dari GCS yang cenderung berusaha untuk mempertahankan norma-norma yang telah ada, kemudian reformis merupakan GCS yang berusaha untuk mengoreksi atau merevisi apa yang kurang dari pada norma atau kebijakan yang ada, kemudian yang terakhir ada radikal, dimana GCS ini hadir bertujuan untuk mengubah norma-norma yang telah ada.⁶⁰

Untuk radikal sendiri, Jan Aart Scholte menunjuk beberapa gerakan sosial yang dapat dikategorikan sebagai GCS yang radikal, salah

⁵⁹ Wawancara Penulis dengan *Staff Communication Specialist PLAN International Indonesia*, Hanna Vanya, Malang, 30 Juni 2021

⁶⁰ Jan Aart Scholte, *Op.Cit.*, hal. 6

satunya adalah feminis. Feminis dianggap sebagai radikal karena jika melihat kenyataannya, budaya patriarki merupakan salah satu budaya atau norma yang sudah berlaku sejak lama, dengan adanya feminis yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sejalan dengan jenis GCS radikal yang berusaha mengubah norma yang telah ada.⁶¹ Jika menyesuaikan apa yang dikemukakan oleh Scholte, hal ini membuktikan bahwa ditinjau secara tujuannya, PII merupakan GCS yang radikal, sesuai dengan misi utama PII dalam memperjuangkan hak kesetaraan anak dan perempuan dalam segala programnya di tengah-tengah budaya patriarki di Indonesia yang masih sangat kuat dipegang oleh sebagian masyarakat.

Berdasarkan penjelasan konsep pada BAB I, penulis menjabarkan pendapat Jan Aart Scholte yang mengemukakan 4 ciri operasional GCS, yaitu membahas isu lintas batas negara, melibatkan komunikasi aktor yang saling melintasi batas negara, memiliki organisasi secara global, dan bekerja yang mengacu pada peningkatan solidaritas supranasional. Mengacu pada 4 ciri operasional yang dijelaskan oleh Scholte, maka dapat dikatakan bahwa *PLAN International Indonesia* termasuk dan dapat dikatakan sebagai GCS.⁶²

a. Membahas isu lintas batas negara:

Sejak awal berdirinya *PLAN International* memiliki misi utama untuk memberikan bantuan kepada anak-anak, seiring berjalannya waktu

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.*, hal. 10

masalah yang terjadi juga semakin kompleks. Oleh karena itu, ketika kondisi Perang Dunia II telah mereda, *PLAN International* melakukan ekspansi untuk berfokus memberikan perlindungan tidak hanya kepada anak-anak tetapi juga memperjuangkan hak perempuan. Hingga saat itu, *PLAN International* konsisten untuk menjadi organisasi dengan kedua fokus tersebut hingga saat ini, termasuk kepada PLAN di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Isu gender merupakan salah satu isu atau agenda internasional yang hingga saat ini diperjuangkan oleh banyak organisasi dan individu, diperkuat dengan salah satu *goals* dari SDGs yaitu poin no 5, yaitu *gender equality*.

Demi tercapainya perwujudan kesetaraan gender serta perlindungan bagi anak-anak, kaum muda dan perempuan, tentunya PII berupaya menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu organisasi di Indonesia yang memperjuangkan isu gender dengan melakukan beberapa aksi, seperti kampanye, pelatihan, perlindungan, memberikan kesempatan perempuan untuk memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki, dan lain-lain.

b. Melibatkan komunikasi aktor yang melintasi batas negara:

PII sebagai salah satu perwakilan dari *PLAN International* selalu menjaga rantai komunikasi untuk mengetahui perkembangan apa saja berdasarkan hasil rangkaian kerja yang telah direncanakan, kemudian karena PII merupakan organisasi internasional, maka jaringan yang dibentuknya tidak hanya di Indonesia saja, PII membentuk jaringan dengan secara luas dengan beberapa organisasi internasional lainnya seperti UN

Women, *terre des hommes*, ECPAT, dan lain-lain. Kemudian tidak hanya berdasarkan jaringan yang dibentuknya, tetapi jangkauan media sosial dari PII juga tidak hanya untuk audiens di Indonesia saja, tetapi juga audiens yang berasal dari luar Indonesia.

c. Memiliki Organisasi Global:

Scholte mengatakan bahwa organisasi yang bersifat global pada saat melakukan kampanye turut mengadopsi organisasi-organisasi yang melintasi batas negara.⁶³ Bagi *PLAN International* sendiri secara keseluruhan memiliki organisasi pusat yang terletak di *United Kingdom* kemudian tersebar di beberapa negara yang menjadi bagian PLAN itu sendiri. Sehingga, *PLAN International* membawahi 75 negara. Dari ke 75 negara itu, setiap PLAN yang ada harus mengadopsi nilai-nilai yang dimiliki oleh pusat dan disesuaikan dengan masing-masing nilai serta budaya dari negara tersebut.

d. Bekerja Mengacu pada Peningkatan Solidaritas Suprateritorial:

Scholte mengatakan bahwa pada dasarnya GCS terbentuk karena dilatarbelakangi sentimen solidaritas lintas dunia. *PLAN International* terbentuk karena adanya inisiasi dari seorang jurnalis yang ingin memberikan bantuan kepada anak-anak akibat korban perang spanyol, sedangkan PII hadir di Indonesia sebagai ‘tangan’ untuk membantu masyarakat Indonesia yang saat itu mengalami krisis besar-besaran.

⁶³ Jan Aart Scholte, *Op.Cit.*, hal. 11

Pendapat Scholte sesuai apa yang terjadi pada *PLAN International* maupun *PLAN International Indonesia*.

Berdasarkan pemaparan diatas terkait konsep *Global Civil Society*, *PLAN International Indonesia* dapat dikatakan sebagai bagian dari GCS yang bertujuan untuk meminimalisir praktik aborsi ilegal dan sebagai salah satu dari banyaknya organisasi internasional yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender di Indonesia. Kehadiran *PLAN International Indonesia* dapat menjadi salah satu bentuk bantuan bagi program-program pemerintah yang belum terlaksanakan dan terealisasi, dengan adanya GCS ini dapat menciptakan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk berpartisipasi di ruang publik sebagai perwakilan rakyat kepada pemerintahan serta pengelolaan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.⁶⁴ Scholte mengungkapkan bahwa kehadiran *Global Civil Society* ini berdampak pada penggeseran peran pemerintah yang sebelumnya sebagai ‘pemain tunggal’ berubah menjadi tata kerja baru dimana beberapa persoalan, *Global Civil Society* ikut turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut atas inisiatif sendiri.⁶⁵

2.3.4 Program Kerja *PLAN International Indonesia*

PLAN International Indonesia memperjuangkan hak anak-anak, kaum muda, dan perempuan melalui program-programnya untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia, salah satunya dalam persoalan hak

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 22

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 17

pemenuhan kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia yang dianggap sebagai salah satu indikator dalam terpenuhinya kesetaraan pada perempuan dan menghindari kemungkinan terjadinya *sexual and gender-based violence*. Bagi PII adanya pengenalan dini kesehatan seksual dan reproduksi pada anak-anak dan kaum muda sebagai salah satu bentuk pencegahan kemungkinan adanya penyalahgunaan atas kepolosan anak-anak terhadap informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang dimanfaatkan oleh orang lain, seperti dimanipulasi untuk berhubungan, ataupun dilecehkan.⁶⁶ Untuk mengurangi kemungkinan tersebut, PII membentuk program-program yang mendukung pemenuhan akses kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia.

a. *Let's Talk!*

Let's Talk! Merupakan salah satu *project* dibawah program kesehatan seksual dan reproduksi yang berlangsung di tahun 2018-2020. Program ini berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh anggota PII terhadap kasus kehamilan dan perkawinan anak usia 15-19 tahun di Lombok Utara dan Mataram. Pada tahun 2018-2019 diketahui terdapat 2000 kasus kehamilan remaja usia 15-19 tahun di Lombok Utara serta laporan berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bahwa dari tahun 2019-2020 tercatat sebanyak 1.137 permintaan dispensasi perkawinan

⁶⁶ *Ibid.*

anak, dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 59%.⁶⁷ Salah satu kasus serupa yang dialami oleh seorang remaja bernama Liza berusia 17 tahun yang mengakui telah menikah dua kali pada saat Liza berusia 15 tahun. Dampak dari pernikahan ini, Liza tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat rasa malu yang dihadapinya atas masa lalunya.⁶⁸

Melalui *project Lets's Talk!* PII melakukan pendampingan kepada 6 sekolah di wilayah Nusa Tenggara Barat, yaitu SMAN 8 Mataram, SMPN 16 Mataram, SMPN 17 Mataram, SMAN 1 Kayangan, SMKN 1 Gangga, dan SMPN 2 Gangga. Dengan adanya pendampingan kepada beberapa sekolah ini PII melakukan diskusi dan pelatihan terkait topik kesehatan seksual dan reproduksi dengan tujuan untuk mencegah perilaku seks pranikah dan pernikahan pada anak.⁶⁹ Melalui program ini, PII juga mendorong agar remaja untuk lebih aktif dalam berkampanye terkait pentingnya pemenuhan kesehatan seksual dan reproduksi di Lombok, sehingga remaja-remaja tidak hanya menerima informasi atau edukasi saja, tetapi didorong untuk berpartisipasi secara aktif. PII menargetkan sebanyak 216 pendidik sebaya, 3456 remaja, 2149 orangtua dan 42 guru untuk turut berpartisipasi dalam program ini. PII berharap dengan adanya program ini dapat memberikan pemahaman bahwa perilaku seks pranikah adalah perilaku beresiko pada remaja serta pemahaman terhadap orangtua jika

⁶⁷ PLAN International Indonesia, *PLAN Indonesia Libatkan Remaja Mataram dan Lombok Utara*, diakses dalam <https://plan-international.or.id/id/plan-indonesia-libatkan-remaja-mataram-dan-lombok-utara/> (7/7/2021, 15:53 WIB)

⁶⁸ UNFPA Indonesia, *Child Marriage in NTB is Alarming*, diakses dalam <https://indonesia.unfpa.org/en/news/child-marriage-ntb-alarming>, (7/7/2021, 16:06 WIB)

⁶⁹ PLAN Indonesia Libatkan Remaja Mataram dan Lombok Utara, *Loc.Cit.*

pernikahan pada anak bukan sebuah solusi yang tepat, tetapi hanya akan memperburuk masa depan anak.⁷⁰

b. *Yes I Do*

Yes I Do merupakan *project* lain dari PII pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2020. *Project* ini berupaya mencegah pernikahan usia anak dan kehamilan pada remaja di beberapa wilayah Indonesia seperti di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sukabumi.⁷¹ *Project* ini berangkat dari kondisi wilayah dampingan PII yang diketahui tingkat pernikahan pada usia anak, kehamilan pada remajanya masih tinggi, yang salah satunya dilatarbelakangi oleh kondisi adat dan budaya dari masing-masing daerah, salah satunya adalah tradisi Merarik yang masih banyak dipercayai oleh Suku Sasak. Merarik merupakan sebuah tradisi perkawinan yang dipercayai oleh masyarakat Suku Sasak dengan latar belakang pasangan yang terlibat hubungan berpacaran membawa pasangan perempuannya melarikan diri dari rumah tanpa sepengetahuan orangtua dan kerabat selama kurang lebih 3 hari dari suatu tempat hingga ke rumah pihak keluarga laki-laki.⁷²

Sayangnya, tradisi ini disalahgunakan untuk menikahkan perempuan dibawah umur dengan alasan karena saling cinta ataupun untuk mengurangi

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ PLAN International Indonesia, *Buku Foto Yes I Do – Memupuk Asa Melawan Perkawinan Anak*, diakses dalam <https://plan-international.or.id/id/buku-foto-yes-i-do-memupuk-asa-melawan-perkawinan-anak/>, (8/7/2021, 13:04 WIB)

⁷² Hilman Syahril Haq, *Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak*, *Perspektif*, Vol. XXI No. 3 Tahun 2016, hal. 160-163

beban perekonomian keluarga. Oleh karena itu, melalui program ini PII berfokus pada lima pilar yang meliputi gerakan sosial berbasis komunitas, keterlibatan kaum muda forum dan kegiatan, kemudahan akses bagi anak perempuan untuk memperoleh informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi, memberikan pilihan kepada kelompok remaja khususnya perempuan untuk memperoleh pendidikan baik itu formal maupun non formal, dan pilar yang terakhir adalah melalui program ini PII mendorong advokasi peraturan pemerintah guna memberikan perlindungan untuk anak-anak dan perempuan dari pernikahan pada anak.⁷³

Untuk meningkatkan efisiensi *project* ini, PII bekerjasama dengan beberapa organisasi yang memiliki visi dan misi serupa, seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR), dan Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), dan Rutgers WPF Indonesia.⁷⁴ PII melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar, tokoh adat serta pemuka agama untuk memperkenalkan *project* ini, serta mengenalkan betapa pentingnya menghindari anak yang masih dibawah umur untuk melakukan hubungan seks pranikah dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. PII melakukan kegiatan diskusi berbagi dengan masyarakat termasuk kepada masyarakat yang berpengalaman dalam menikah ketika masih dibawah umur dengan harapan diskusi ini dapat membuka mata masyarakat

⁷³ PLAN International Indonesia, 2021, *Memupuk Asa Melawan Perkawinan Anak*, hal. 15-16

⁷⁴ *Ibid*, hal. 10

untuk lebih menjaga anak-anaknya dari perilaku beresiko dan pernikahan pada anak.⁷⁵

Melalui *project Yes I Do*, PII menggandeng kaum muda untuk aktif dalam membentuk sebuah forum dan kegiatan yang dapat mengedukasi anak-anak terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Oleh karena itu, terbentuklah Forum Anak Desa (FAD) yang menjadi aktor aktif untuk meningkatkan *awareness* dan memberikan edukasi kepada usia sebaya sehingga pendekatan yang lebih mudah kepada anak-anak. Melalui FAD ini, kaum muda mengadakan kegiatan-kegiatan positif seperti kesenian dan bisnis untuk sebagai bentuk pengalihan anak-anak dan kaum muda untuk melakukan perilaku berisiko serta memberdayakannya agar lebih kreatif dan dapat dimanfaatkan di waktu yang akan datang.

Sebagai bentuk pemenuhan akses dan layanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi bagi anak-anak dan kaum muda di wilayah dampingan ini, melalui FAD, PII membantu mendirikan posyandu remaja sebagai tempat konseling bagi remaja perempuan terkait kesehatan seksual dan reproduksinya. Kemudian, FAD aktif melakukan kampanye berkeliling di sekitar wilayah desa untuk meningkatkan *awareness* terhadap bahayanya pernikahan pada anak, serta upaya untuk menghilangkan stigmatisasi tabu terkait persoalan kesehatan seksual dan reproduksi melalui forum diskusi bersama anak-anak maupun orangtua.⁷⁶ Selama 4 tahun *project* berjalan, PII

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

bersama dengan organisasi yang terjaring berhasil mengurangi pernikahan pada anak sebesar 32%.⁷⁷

c. *Down To Zero*

Project lainnya dari program kesehatan seksual dan reproduksi PII adalah *Down To Zero*. *Project* ini berlangsung selama kurang lebih 5 tahun sejak Januari 2016 hingga Desember 2020.⁷⁸ *Project* ini merupakan inisiasi dari PLAN Belanda dibawah langsung oleh kementerian luar negeri belanda. PLAN Belanda menggandeng 11 negara yang meliputi India, Bangladesh, Nicaragua, Brazil, Republik Dominika, Bolivia, Kolombia, Peru, Filipina, Thailand, dan Indonesia.⁷⁹

Project ini memiliki tujuan utama untuk menghapuskan eksploitasi seksual pada anak terutama pada 11 negara aliansi. Tingginya angka eksploitasi pada anak yang mencapai 2 juta menjadi latar belakang *project* ini dibentuk oleh PLAN Belanda. Sasaran dari *project* ini adalah anak-anak dan perempuan dibawah umur yang beresiko menjadi korban khususnya bagi anak-anak yang tergolong pada kelompok yang rentan.⁸⁰

PLAN Belanda menggandeng Indonesia karena melihat kondisi di Indonesia masih banyak ditemukan kasus eksploitasi pada anak dan

⁷⁷ PLAN International Indonesia, *Melalui Proyek Yes I Do, 32 Perkawinan Anak Berhasil digagalkan di Sukabumi, Rembang dan Lombok Barat*, diakses dalam <https://plan-international.or.id/id/melalui-proyek-yes-i-do-32-perkawinan-anak-berhasil-digagalkan-di-sukabumi-rembang-dan-lombok-barat/> (8/7/2021, 15:33 WIB)

⁷⁸ Down To Zero Alliance, *About Us: General Information*, diakses dalam <http://www.downtozeroplatform.com/dtz/site/about> (8/7/2021, 19:42 WIB)

⁷⁹ PLAN International, 2016, *Annual Report 2016: Narrative Report of the Down To Zero Alliance*

⁸⁰ Down To Zero Alliance, *Op.Cit.*,

perempuan di bawah umur. Berdasarkan laporan KPAI, diperkirakan sebanyak 100.000 anak diperdagangkan setiap tahunnya. 30% pekerja seks komersil merupakan kelompok remaja dibawah usia 18 tahun. Pada tahun 2016 sendiri dilaporkan sebanyak 56.000 terdapat pekerja seks dibawah umur.⁸¹ PII bergerak di wilayah dampingan sesuai hasil temuan PII yang memiliki angka cukup tinggi dalam kasus eksploitasi anak, yaitu di Jakarta, Surabaya dan Lombok. Hal ini dilatarbelakangi karena lokasinya yang merupakan kota besar di Indonesia dan kerap menjadi tujuan bagi wisatawan. PII menunjuk beberapa lokasi yang rentan dan banyak ditemukan adanya perdagangan dan eksploitasi pada anak dibawah umur, yaitu di restoran, transportasi, tempat hiburan, dan anak-anak yang menjadi pedagang jalanan.⁸²

Melalui program ini, upaya yang dilakukan PII dalam mendukung keberhasilan penghapusan eksploitasi pada anak dibawah umur adalah dengan beberapa strategi, yaitu menyebarluaskan informasi terkait resiko ESKA dan mengkampanyekan penghapusan ESKA di Indonesia melalui beberapa media, menetapkan aturan internal dalam kegiatan operasional khususnya pada sektor pariwisata, memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan di lokasi beresiko untuk mengenali ciri-ciri korban dan pelaku di lokasi bekerja, menuntut kepada pengusaha sektor pariwisata untuk

⁸¹ Asia Sentinel, *Indonesia's Child Trafficking Crisis*, diakses dalam <https://www.asiasentinel.com/p/indonesia-child-trafficking-crisis> (8/7/2021,19:56 WIB)

⁸² Down To Zero Coordinator,2019, *Kolaborasi Sektor Swasta di Lingkungan Pariwisata dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*

memberikan laporan tahunan terkait pengunjung kepada pemerintah setempat, kemudian PII juga melakukan pengawasan serta perlindungan dengan mencantumkan telepon pengaduan di beberapa lokasi.⁸³

Poin penting yang menjadi sasaran dalam *project* ini adalah anak-anak yang menjadi korban diberdayakan dan dapat bertindak sebagai agen perubahan yang dapat melindungi diri dan membantu anak-anak lain untuk mengenali motif pelaku ESKA, lingkungan komunitas korban dipastikan aman sehingga korban dapat diterima dan mendapatkan perlindungan, melihat kondisi banyaknya kasus ESKA pemerintah dapat merancang kebijakan untuk melawan serta menghapus ESKA di Indonesia, dan sasaran yang terakhir adalah pelaku bisnis khususnya pada bisnis sektor pariwisata diharapkan aktif terlibat dalam perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan di bawah umur.⁸⁴

Berdasarkan beberapa *project* yang telah diadakan oleh PII dapat terlihat bahwa PII sebagai *global civil society* memiliki prinsip untuk mengedepankan perlindungan terhadap anak-anak, kaum muda, dan perempuan, sehingga cara pandang PLAN dalam menanggapi isu seperti perilaku seks pranikah atau aborsi di Indonesia, harus melihat kondisi dan memposisikan diri sebagai anak tersebut.⁸⁵ PII memiliki nilai serta budaya kerja tersendiri yang harus ditetapkan bagi setiap individu atau kelompok yang terlibat pada PII berdasarkan kebijakan yang dimiliki

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Down To Zero Alliance, *Op.Cit.*,

⁸⁵ Wawancara Penulis dengan *Staff Project Down to Zero PLAN Indonesia*, Bagus Yaugo Wicaksono, 30 Juni 2021

oleh setiap *PLAN International* yang diterapkan oleh PLAN di berbagai negara, yaitu *safeguarding children and young people policy*, yang memfokuskan kepada pemberian perlindungan terhadap anak-anak, kaum muda termasuk pada persoalan gender dan yang menyangkut pihak yang dianggap inklusif.⁸⁶

Secara moral, PII tidak membenarkan perilaku seks pranikah pada kaum muda dikarenakan tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang membahayakan individu tersebut dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan tindakan ilegal, terutama jika seks pranikah dilakukan oleh anak dibawah umur karena sudah termasuk perilaku yang melanggar *statutory rape*.⁸⁷ *Statutory rape* adalah aturan standar terhadap pemerkosaan atau hubungan seks, dimana di Indonesia sendiri adanya aturan pelarangan melakukan hubungan seks pranikah dengan anak dibawah umur seperti usia 15 dan 18 tahun, walaupun dilakukan suka sama suka.⁸⁸ Kondisi di Indonesia kebanyakan remaja yang melakukan hubungan seks pranikah dan berakibat KTD akan dinikahkan oleh orang tua mereka. Pandangan ini yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki oleh PII sehingga PII berusaha melawan persepsi seperti ini untuk memberikan perlindungan anak-anak dari adanya kemungkinan aborsi dan pernikahan dini pada anak dibawah umur. Menurut PII, menjadikan pernikahan dini sebagai solusi merupakan bentuk

⁸⁶ Wawancara penulis dengan *Staff* bagian *Safeguarding Children and Young People*, Sigit Wacono, Malang, 28 Juni 2021

⁸⁷ Bagus Yaugo Wicaksono, *Op.Cit.*,

⁸⁸ Arnold Porter, 2018, Kaye Scholer, *Age of Consent: Legal, Ethical Cultural and Social Review – Indonesia Country Report*, London: Thomson Reuters Foundation

solusi yang cenderung menyudutkan remaja tersebut dan berpotensi membahayakan serta merugikan masa depan anak-anak tersebut.⁸⁹

Berangkat dari kebijakan, nilai, moral, serta budaya kerja yang diterapkan oleh PII, PII memiliki pandangan yang berbasis HAM dan moral yang mengutamakan keselamatan dan perlindungan pada anak, sehingga pandangan antara *pro-life* dan *pro-choice* dalam memperdebatkan persoalan aborsi tidak bisa ditetapkan untuk anak-anak, karena hal itu baru bisa diaplikasikan kepada orang-orang dewasa yang telah memiliki hak dan tindakan atas tubuhnya yang dipikirkan secara matang.⁹⁰ Jika bagi pelaku aborsi yang dilaksanakan pada usia remaja, PII akan melihat prosesnya terlebih dahulu kepada anak tersebut dan tidak menyetujui jika remaja yang melakukan aborsi dijatuhkan hukuman. PII merasa adanya alasan dan latar belakang mengapa seseorang melakukan aborsi seperti adanya rasa takut atau malu, sehingga PII akan memilih untuk memberikan perlindungan kepada anak atau remaja tersebut.⁹¹

PII juga menilai aturan hukum di Indonesia yang masih tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya sebagai perlindungan bagi perempuan dan juga anak-anak. Hukum di Indonesia yang masih samar menghadirkan adanya *gap* yang akan menyebabkan hukum yang berlaku alih-alih melindungi, berujung kepada menjatuhkan pihak yang dimaksud untuk melindungi. Pandangan narasumber tersebut mengacu kepada aturan yang berlaku dalam mengatur persoalan aborsi,

⁸⁹ Bagus Yaugo Wicaksono, *Op.Cit.*,

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

hubungan seksual dengan maksud melindungi, tetapi karena kenyataannya banyak usia remaja yang melakukan sehingga tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan sehingga tidak dapat perlindungan, tetapi mendapatkan hukuman. Sehingga, dengan adanya peristiwa seperti itu, menurut PII dapat menjadi temuan yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah pada saat melakukan revisi undang-undang yang mengatur aborsi ataupun hubungan seksual kepada pasangan yang belum menikah.

